

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SABER
PUNGLI DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

ADISTI FAUZIAH
NIM. 14340019

PEMBIMBING:

- 1. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**
- 2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Yogyakarta yang merupakan suatu Kota yang rawan terkena pungli. “Tim Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sedangkan tugas dari Tim Satgas Saber Pungli telah tercantum dalam pasal 2 Perpres Nomor 87 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah, sedangkan kewenangan dari Tim Satgas Saber Pungli untuk memberantas tindakan pungli di masyarakat telah di atur dalam pasal 4 Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Satgas Saber Pungli sudah dibentuk dengan baik tetapi realita di masyarakat masih sering terjadi pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara wawancara dengan anggota Tim Satgas Saber Pungli. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Yogyakarta yaitu dengan melakukan pemasangan poster-poster di kantor-kantor pelayanan publik, selain itu Tim Satgas Saber Pungli juga melakukan imbauan-imbauan kepada para pejabat pelayanan publik agar tidak melakukan pungutan liar. Namun, sosialisasi atau imbauan yang di lakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli ini ternyata tidak bersifat rutin, dan Tim Satgas Saber Pungli ini dalam melakukan sosialisasi hanya melibatkan pejabat pelayanan publik tetapi tidak mengajak masyarakat biasa untuk ikut serta dalam sosialisasi ini. Kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Yogyakarta juga menyebabkan tindak pidana pungutan liar ini tetap berkembang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adisti Fauziah
NIM : 14340019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2018



NIM. 14340019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adisti Fauziah

NIM : 14340019

Judul Skripsi : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Dembimbing II


Prof. Dr. H. Makhrus M, S.H., M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-28/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SABER
PUNGLI DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADISTI FAUZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340019
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Bahie
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Iswantoro
Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 13 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Majid Mir
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Learn From yesterday,

live for today,

hope for tomorrow.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah yang selalu memberikan kemudahan dalam segala hal sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kepada keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya untuk kelancaran kehidupan saya.
3. Bapak Ahmad Bahiej yang berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan masukan serta motivasi. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat selama ini.
4. Bapak Makhrus Munajat yang senantiasa memberikan ilmunya serta selalu sabar memberikan bimbingannya.
5. Bapak, Ibu Dosen yang senantiasa memberikan ilmunya yang bermanfaat
6. Seorang sahabat Nisa Auliana Boru Tampubolon yang selalu sabar dan mendukungku dalam setiap langkahku.
7. Polres Kota Yogyakarta yang telah berkenan menerima saya untuk melaksanakan penelitian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ **Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam kelengkapan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan masukan yang baik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Ayah serta kakak-kakakku yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seorang sahabat Nisa Auliana Boru Tampubolon yang selalu sabar dan mendukungku dalam setiap langkahku
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2014 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini.
10. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 20 Januari 2018

Penyusun



Adisti Fauziah

NIM. 14340019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
C. Telaah Pustaka.....	6
D. Kerangka Teoretik.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II:TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR.....	21
A. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur Tindak Pidana.....	23

B. Pengertian Pungutan Liar dan Unsur Pungutan Liar.....	27
1. Pengertian Pungutan Liar	27
2. Pungutan Liar Dalam KUHP	32
3. Unsur Pungutan Liar	34
C. Tindak Pidana Korupsi.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
2. Institusi Yang Berwenang Memberantas Korupsi	39
3. Perbedaan Kasus Korupsi dan Pungutan Liar.....	42
BAB III: DESKRIPSI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR	44
A. Ruang Lingkup Tim Satgas Saber Pungli	44
B. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Satgas Saber Pungli.....	50
C. Wilayah Kerja dan Mekansime Pengangkatan Personil Satgas Saber Pungli	52
D. Data Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar.....	55
BAB IV: ANALISIS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM SATGAS SABER PUNGLI	60
A. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Yang Dilakukan Oleh Satgas Saber Pungli.....	60
B. Mekanisme Pengaduan Pungutan Liar	69
C. Mekanisme Penindakan Pungutan Liar.....	74
D. Kendala Dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Pungutan Liar	80
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Susunan Personalia Satgas Saber Pungli	45
Tabel 3.2 : Tabel Data Kasus Bulan Januari 2017	56
Tabel 3.3 : Tabel Data Kasus Bulan Desember 2017	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan semakin maraknya praktik tentang pungli. Meskipun praktik pungli masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli tersebut tetap semakin merajalela terutama pada fasilitas pelayanan publik. Beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli.¹

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli. Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan sehingga menyebabkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

¹ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober-2016-45.pdf. Di akses tanggal 10 oktober 2017. Pukul 10.25 WIB

Pembentukan dari Satgas Saber Pungli ini sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang di rencanakan Presiden Joko Widodo.

Satgas Saber Pungli berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dari Satgas Saber Pungli adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien. Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli juga mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/ lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala pemerintahan daerah;

Dan

7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.²

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh yang berwenang. Dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.³

Tindak pidana pungutan liar juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kota Yogyakarta. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta tentang kasus pungutan liar yang berada di wilayah hukum polres kota Yogyakarta. Misalnya, tentang kasus pungutan liar yang berada di alun-alun selatan Kota Yogyakarta. Tersangka dari kasus pungutan liar ini adalah dua orang yaitu saudara Triyono Sugeng dan saudara Priambodo. Kedua tersangka tersebut menarik uang parkir yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Yogyakarta. Mereka di tangkap pada tanggal 15 januari 2017 pada pukul 22.00 WIB dan dari kedua tersangka tersebut telah di sita berbagai barang bukti. Barang bukti tersebut adalah uang tunai berjumlah Rp.476.000,00

²Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>. Di akses pada tanggal 10 oktober 2017. Pukul 11.46 WIB

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 129 lembar karcis sepeda motor dan 38 lembar karcis mobil.

Kemudian terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta terkait kasus pungutan liar tentang penarikan uang parkir yang bertempat di halaman masjid kahuman. Terdapat tiga orang yang di tangkap terkait tentang kasus parkir ini. Mereka adalah saudara M Hasfi Galang, Ismail, dan Muslih. Penangkapan itu dilakukan pada tanggal 15 januari 2017 pada pukul 18.30 WIB. Dari ketiganya telah disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 11 lembar karcis parkir.

Kasus penangkapan yang selanjutnya adalah penangkapan oknum Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 10 februari 2017 pada pukul 14.00 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Yogyakarta. Tersangka tersebut adalah saudara Widi Parwoto. Saudara Widi Parwoto di jerat dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Melihat dari beberapa kasus tindak pidana pungutan liar tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pungutan liar tersebut, padahal sudah terdapat

Satgas Saber Pungli yang dinilai dapat membantu permasalahan ini. Maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satgas Saber Pungli dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?
2. Apakah penanganan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dapat mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan satgas saber pungli dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peran polisi dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi satgas saber pungli dalam melakukan tugasnya untuk memberantas kasus pungutan liar di masyarakat.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah pungutan liar yang terjadi di wilayah kota Yogyakarta dan tata cara penanggulangan serta pencegahannya.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang.

Setelah penyusun melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literature yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan di bahas oleh penyusun. Beberapa

literature yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Alfia Rizky Ayu Rocketza yang berjudul tentang “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)” membahas tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi serta membahas tentang hambatan-hambatan yang di hadapai jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus perkara korupsi. Perbedaan nya adalah pada skripsi di atas membahas mengenai kewenangan pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk menyidik kasus perkara korupsi⁴. Sedangkan dalam skripsi penyusun lebih khusus membahas tentang kewenangan satuan tugas saber pungli dalam menanggulangi kasus pungutan liar. Sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia Rizky Ayu Rocketza.

Skripsi yang di tulis oleh welli siswanto yang berjudul tentang “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011-2013)” membahas tentang bagaimana penanggulangan terhadap tindak kejahatan pemerasan dan

⁴ Alfia Rizky Ayu Rocketza, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi(Studi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

pengancaman yang dilakukan oleh Polres Klaten⁵. Sedangkan dalam skripsi penyusun ini membahas tentang upaya penanggulangan juga tetapi penanggulangan terhadap kasus pungutan liar, sehingga objek penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini sangatlah berbeda dengan saudara Welli Siswanto. Selain dari segi objek yang akan diteliti berbeda, dari segi subjek yang akan diteliti pun juga berbeda. Pada hal ini penyusun akan melakukan penelitian terhadap satuan tugas Saber Pungli dan pihak kepolisian terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Sunatunabawiyah yang berjudul tentang “Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak Dan Gas Tahun 2013 – 2014” membahas tentang peran dari lembaga PPATK dalam penegakan tindak pidana korupsi tersebut serta membahas mengenai hambatan yang dihadapi dalam mengungkap transaksi keuangan dari hasil tindak pidana korupsi minyak dan gas tersebut. Pada skripsi karya Sunatunabawiyah ini lebih menekankan pada tingkat peran aktif dari lembaga PPATK dalam memberantas kasus korupsi minyak dan gas tahun 2013 – 2014.⁶

⁵ Welli Siswanto, “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2012-2013)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁶ Sunatunabawiyah, “Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak Dan Gas Tahun 2013 – 2014”, Skripsi,

skripsi yang di tulis oleh Wahib Zain yang berjudul tentang “ Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam” membahas tentang kriteria dan sanksi yang di timbulkan akibat dari tindak pidana suap menurut UU Tipikor dan hukum pidana Islam. Skripsi karya Wahib Zain ini melakukan perbandingan antara hukum positif dengan hukum pidana islam. Sehingga dalam skripsi karya Wahib Zain ini penelitian nya bersifat deskriptif – analitik dan komparatif yakni memaparkan permasalahan tentang kriteria dan sanksi tindak pidana suap menurut UU Tipikor maupun dengan hukum pidana islam perbandingan dari segi kriteria dan dari segi sanksi.⁷

Dari beberapa telaah pustaka yang telah di analisis, penyusun belum menemukan mengenai penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang berkaitan dengan satgas saber pungli dan juga kepolisian. Berangkat dari sinilah penyusun melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang berada di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta. Penelitian ini pun juga akan berbeda dengan penelitian–penelitian sebelumnya.

(Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

⁷ Wahib Zain, “ Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

E. Kerangka Teoretik

Di dalam kerangka teoritik ini memuat tentang teori-teori yang relevan dengan yang akan penyusun bahas, menjelaskan pula tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana pungutan liar. Teori-teorinya adalah sebagai berikut;

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah mendapatkan putusan bersalah. Pencegahan dari suatu kejahatan menjadi merupakan usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan. Karena pada dasarnya apabila kejahatan tersebut dapat di cegah maka seseorang tersebut tidak akan terjerumus pada dunia kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan tersebut terdapat dua cara atau dua metode, yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan).⁸

Adapun menurut bonger yang berpendapat tentang hal yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

⁸ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm.31

- a. *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan *prevensi* dalam arti sempit. *Prevensi* yang dimaksud adalah tentang memperteguhkan moral seseorang agar tidak terjerumus untuk berbuat jahat serta mencegah tumbuhnya keinginan untuk terjerumus kedalam kejahatan.
- b. Berusaha melakukan pengawasan terhadap kejahatan dengan menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif serta hukum yang baik.⁹

Kemudian untuk metode penanggulangan kejahatan yang kedua adalah tindakan *represif*. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum, tindakan ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Pada umumnya tindakan ini dapat berupa hukuman atau sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara *represif* ini juga dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Cressy membagi konsepsi tentang rehabilitasi ini menjadi dua konsep, yaitu:

- a. Menciptakan suatu program untuk menghukum para pelaku kejahatan, hukuman tersebut bersifat memperbaiki. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman bersyarat dan kurungan.
- b. Selain para pelaku mendapat hukuman atas perilaku kejahatannya, para pelaku kejahatan pun juga di bimbing agar mereka dapat

⁹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15

menjadi orang biasa seperti ketika sebelum melakukan kejahatan. Ketika para pelaku kejahatan sedang dalam melewati masa hukumannya maka para pelaku kejahatan diberikan pelatihan ketrampilan khusus serta konsultasi psikologis agar mereka dapat berkembang ke dalam hal yang positif setelah mereka melewati masa hukuman tersebut.¹⁰

Diperlukan suatu kerjasama antar berbagai pihak untuk dapat menerapkan teori penanggulangan kejahatan ini agar dapat tercapai suatu keteraturan, keamanan serta kenyamanan di suatu negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial. Sehingga dapat disimpulkan

¹⁰ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Trasito, 1980) hlm. 15

bahwa penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang di rumsukan oleh hukum pidana substantif (*substantife law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini tidak dapat dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana yang anataralain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, hukum pidana substantive sendiri pun juga memberikan batasan-batasan. Misalnya di butuhkan aduan-aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi serta dana. Yang mengharuskan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹¹

Friedman mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan hukum. Menurutnya, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi hukum

Didalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya. Yang didalamnya mencakup berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB>. Di akses pada tanggal 19 september. Pukul 12.40 WIB.

mengakomodir berjalannya suatu sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga harus lebih di tingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik.¹²

3. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan suatu norma yang didalamnya memuat aturan-aturan hidup manusia agar tercapai rasa kenyamanan dan rasa keamanan di antara masyarakat. Manusia sendiri apada dasarnya harus mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat.

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang di wujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan di rasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

¹² Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. Ke VIII*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.25

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan tersebut maka kita dapat melihat seperti apa efektifnya suatu peraturan dan sanksi dari tindakan pungutan liar tersebut. Jika masyarakat Indonesia mematuhi peraturan tentang tindak pidana pungutan liar tersebut dengan ketaatan *internalization* maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kualitas keefektifan aturan tentang tindak pidana pungutan liar tersebut sudah semakin tinggi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hal yang di harapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah di uraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹³ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran>. Diakses pada tanggal 19 september 2017. Pada pukul 16.00 WIB.

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kasus tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis deskriptik analitik, yaitu dengan memaparkan realitas atau kenyataan yang ada dengan sistematis dan akurat. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.¹⁵ Penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang berad di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data. Penyusun akan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa:

¹⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*,(Jakarta: Kencana, 2012),hlm.22

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik,ed. 1,cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), hlm.17

- a. Observasi, adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak di dalam sebuah objek penelitian.¹⁶ Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi, dimana lokasi tersebut berada di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung kepada suatu objek diteliti secara lebih dalam.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan dengan cara melakukan proses tanya jawab kepada Satgas Saber Pungli dan Kepolisian.¹⁷ Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak dari kepolisian dan para pihak terkait.
- c. Dokumentasi adalah suatu dokumen yang resmi dan ada kaitannya dengan obyek penelitian. Biasanya berupa naskah kearsipan dan dokumen – dokumen terkait.¹⁸

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.100

¹⁷ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.21

¹⁸ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta pengumpulan data–data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan primer, bahan tersebut dapat berupa buku–buku.

c. Data tersier

Bahan yang di gunakan dalam data tersier ini adalah berupa kamus.

6. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data yang akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah di peroleh tersebut dengan menggunakan analisis *kualitatif deduktif*. *Kualitatif deduktif* adalah suatu analisa dari suatu data yang di peroleh yang bersifat umum tersebut untuk kemudian di uraikan dan di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis, yaitu antara bab satu dengan yang lain nya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2004), hlm. 57

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada,1982) , hlm.32

merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pungutan liar, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pungutan liar, unsur-unsur pungutan liar, serta penanggulangan tindak pidana.

Bab ketiga ini akan mendeskripsikan gambaran umum tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, mekanisme pengangkatan anggota Tim Satgas Saber Pungli, deskripsi kasus pungutan liar.

Bab ke empat, berisi tentang hasil analisis masalah penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Yogyakarta dan Tim Satgas Saber Pungli terhadap tindak pidana pungutan liar.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan di dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebelumnya telah dibahas mengenai kewenangan yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli selama ini. Kewenangan tersebut telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada.
2. Untuk menjalankan tugasnya Tim Satgas Saber Pungli telah membangun sistem pencegahannya dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pungutan liar di lingkungan pelayanan publik Kota Yogyakarta serta menempelkan poster-poster di Kantor-Kantor pelayanan publik. Tim Satgas Saber Pungli juga selalu mengadakan pertemuan rutin setiap seminggu sekali untuk melakukan koordinasi tentang operasi pemberantasan pungutan liar. Dalam beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Tim Satgas Saber Pungli seperti kasus parkir liar, Tim Satgas Saber Pungli juga telah melakukan operasi tangkap tangan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016

tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli pada dasarnya dapat menanggulangi tindak pidana pungutan liar. Apabila di hitung dalam jumlah presentase, upaya yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli tingkat keberhasilannya mencapai 75% dan kekurangan 25% nya terdapat pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti tentang hal yang terkait di atas antara lain:

1. Bagi Tim Satgas Saber Pungli agar dapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi lebih rutin. Kemudian untuk sosialisasi yang di adakan jangan hanya mengajak pejabat pelayanan publik semata, namun mengajak warga Kota Yogyakarta juga agar warga Kota Yogyakarta juga memahami apa itu pungutan liar dan bagaimana cara melaporkannya dengan baik. Tim Satgas Saber Pungli juga hendaknya memberikan sosialisasi hukum yang merata kepada warga Kota Yogyakarta.
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat Kota Yogyakarta untuk mematuhi hukum dengan lebih baik agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan tenteram.

3. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara masyarakat Kota Yogyakarta dengan aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar. karena tanpa adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum maka akan sulit untuk menanggulangi permasalahan pungli ini.
4. Perlu adanya perubahan sanksi bagi pelaku pungli khususnya tukang parkir, sebaiknya diberikan sanksi yang membangun dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Bukan hanya sanksi denda yang tidak dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta

B. Buku

Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Abidin, Zainal. *Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi. Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
Alumni. 1976.

Ari Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

B, Simanjuntak dan Chairil Ali. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Trasito. 1980.

- Bahiej, Ahmad..*Hukum Pidana*.Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT.Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981.
- D, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. 1976.
- Deni,Saiful. *Korupsi, Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*. Yogyakarta: NaufanPustaka. 2010.
- Gunawan,Gilang Andhika. ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah”. Skripsi. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada. 1982.
- Hartanti,Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Jaya, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): kajian yuridis normatif UU Nomor 31 tahun 1999 jonto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jh. Kumendong, Wempie. “Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 2016”. *Lex Privatium Vol. V Nomor 2 Maret-April 2017*.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Munthe,Juara. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*. Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014
- Nawawi,Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.

- Philipus, M. Hadjon. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Ramadhani, Wahyu. “Penegakan Hukum Daalam Menanggulangi Pungutan Pungutan Liar Terhadap Layanan Publik”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 12 Nomor 2. Juli/Desember 2017.
- Rasyidi, Lili Rasyidi & Ira. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum Cet. Ke VIII*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Rocketza, Alfia Rizky Ayu. “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi Kejaksan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2006.
- Siswanto, Welli. “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Polres Klaten Tahun 2012-2013)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Soedjono. *Pungli (Analaisa Hukum dan Kriminologi)*. Bandung: Sinar Baru Bandung 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Sunatunabawiyah. “Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktik, ed. 1, cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zain, Wahib. “Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

C. Lain – lain

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober-2016-45.pdf. Di akses tanggal 10 oktober 2017. Pukul 10.25 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB>. Di akses pada tanggal 19 september. Pukul 12.40 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BABII.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017. Pada pukul 10.00 WIB.

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran>. Diakses pada tanggal 19 september 2017. Pada pukul 16.00 WIB.

<http://www.oecd.org/daf/antibribery/41194428.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018. Pada Pukul 10.28



CURRICULUM VITAE

Nama : Adisti Fauziah

Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 11 November 1995

Alamat Asal : Kajen RT 15 RW 06, Kelurahan Bonyokan, Kecamatan Jatinom,
Kabupaten Klaten

Alamat Yogyakarta : Jln. Mojo, Gg Mojo 4 Gendeng GK IV/498 Kelurahan Demangan,
Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta

Nomor Hp : 085600799342

Email : adistifauziah1@gmail.com

Nama Orang Tua :

Ayah : Sumarno

Ibu : Almh. Suharti Puji Lestari

Riwayat Pendidikan

TK : Aisyah Bustanul Atfal (2000-2002)

SD : SDN 1 Krajan (2002-2008)

SMP : SMP N 1 Jatinom (2008-2011)

SMA : SMA N 1 Jatinom (2011-2014)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2702/Un.02/DS.1/PN.00/ " " /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

13 November 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Adisti Fauziah	14340019	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polres Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 November 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9490/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2902/Un.02/DS.1/PN.00/11/2017
Tanggal : 13 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : ADISTI FAUZIAH
NIM : 14340019
No.HP/Identitas : 081393781673/3310205111950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Polres Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 16 November 2017 s.d 16 Februari 2018

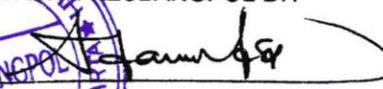
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY¹ selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2993
8466/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/9490/Kesbangpol/2017 Tanggal : 16 November 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ADISTI FAUZIAH
No. Mhs/ NIM : 14340019
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 November 2017 s/d 16 Februari 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


ADISTI FAUZIAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : ~~16-11-2017~~

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris


Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304061986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Ybs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/B/ 35 /XII/2017/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : ADISTI FAUZIAH
No. Mahasiswa : 14340019
Fakultas : Hukum / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum
Program Khusus : Pidana
Alamat : Kajen RT.015 RW.006 Kel.Bonyokan Kec.Jatinom
Kab.Klaten Prov.Jawa Tengah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Desember 2017

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM
KA URMINTU





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dihimpun oleh :

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur –unsur yang terdapat dalam masing –masing pasal kitab Undang – undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 -  a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakuakn perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dlam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dimaksud dlam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negaradalam keadaan perang; atau

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (1) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.



Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



- a. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.



3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B



- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi “keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut :

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya.
6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.(2) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (2) Undang-undang ini.
8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasala baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) , Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Pidana seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Nopember 2001
SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KOESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No.31 Tahun 1999 diundangkan, Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan aksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggaraan negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf I

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12 C
Cukup jelas

Angka 4
Pasal 26 A
Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 37
Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan atas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas
Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku untuk pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
2. Laporan

2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.
12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.

13. Pengendalian

13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
16. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
17. Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditanggguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.
18. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
19. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

24. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota.
25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan.
26. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;
- c. proses penanganan perkara;
- d. pemanggilan

- d. pemanggilan;
- e. penangkapan dan penahanan;
- f. pemeriksaan;
- g. penggeledahan dan penyitaan;
- h. penanganan barang bukti;
- i. penyelesaian perkara;
- j. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
- k. tindakan koreksi dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI

Bagian Kesatu Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pasal 5

- (1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- (2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
 - b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
 - c. memberikan

- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (3) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas;
 - b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau lanjutan;
 - c. telah berpengalaman tugas di bidang reserse paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;
 - e. memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse kepolisian.

Bagian Kedua Laporan Polisi

Pasal 6

- (1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.
- (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
- (4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Pasal 7

- (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- (2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(4) Laporan

- (4) Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Bagian Ketiga Penerimaan Laporan

Pasal 8

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat terjadinya (*locus delicti*) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

Pasal 9

- (1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
- a. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
 - b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 - c. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Bagian Keempat Penyaluran Laporan Polisi

Pasal 11

- (1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
- (2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
- (3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
- (2) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

- a. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
- b. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
- c. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
- d. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
- e. Kepala/Wakil Kepala Polsek.

Bagian Kelima Klasifikasi Perkara

Pasal 14

- (1) Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik;
 - b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Pasal 15

- (1) Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (*extra ordinary*) seperti narkoba dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror).
- (2) Dalam hal penanganan perkara luar biasa (*extra ordinary*) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

(3) Tindakan

- (3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
 - b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
 - c. menutup dan menggeledah lokasi TKP;
 - d. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;
 - e. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
 - f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
 - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
- (4) Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut KUHAP.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda, dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan reserse.
- (2) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
- a. suatu perkara yang lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah kesatuan;
 - b. perkaranya merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih yang masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan;
 - c. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan yang berbeda; dan
 - d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan yang berbeda-beda.
- (3) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk tujuan:
- a. mempercepat proses penyidikan;
 - b. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
 - c. memudahkan

- c. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggunaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan
- d. memudahkan komunikasi pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan.

Pasal 18

- (1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum kesatuannya.
 - b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa Polda.
- (3) Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan disatukan penanganannya.

Pasal 19

- (1) Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan.
- (2) Tim Penyidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS);
 - b. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan beberapa instansi;
 - c. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah kesatuan.
- (3) Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
 - a. Direktur

- a. Direktur Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup wilayah antar Polda;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda; dan
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

BAB III

PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum

Pasal 20

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.
- (2) Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

Pasal 21

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.
- (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:
 - a. pengamatan (observasi);
 - b. wawancara;
 - c. pembuntutan;
 - d. penyamaran;
 - e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
 - f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
 - g. merekam

- g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang berbicara; dan
 - h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi forensik, dan kedokteran forensik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik membuat rencana penyelidikan.
- (2) Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Penyelidik.
- (3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Bagian Kedua Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum

Pasal 23

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyelidik.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyelidik/penyidik setingkat:
 - a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim;
 - b. Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda;
 - c. Kepala Polwil untuk wilayah di luar Polwil;
 - d. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan
 - e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek.
- (2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang berwenang setempat.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.
- (2) Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran dan keberhasilan penyelidikan.
- (3) Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.

**Bagian Ketiga
LHP****Pasal 26**

- (1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
- (2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan Penyelidik.

Pasal 27

- (1) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
- (2) LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik.

Pasal 28

- (1) LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan:
 - a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
 - b. tindakan

- b. tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana; dan
 - c. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.
- (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau instansi/pihak di luar Polri.
- (4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor.

Bagian Keempat Pengendalian Penyelidikan

Pasal 29

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang:

- a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian;
- b. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;
- d. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
- e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
- f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/ pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah hukum dimana dilakukan penyelidikan; atau
- g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

BAB IV**PROSES PENANGANAN PERKARA****Bagian Kesatu
Perencanaan****Paragraf 1
Rencana Penyidikan****Pasal 30**

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
 - a. pembuatan tata naskah; dan
 - b. rencana penyidikan.
- (2) Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. SPDP;
 - e. Rencana Penyidikan;
 - f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan
 - g. Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.
- (3) Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. rencana kebutuhan;
 - c. target pencapaian kegiatan;
 - d. skala prioritas penindakan; dan
 - e. target penyelesaian perkara.

**Paragraf 2
Batas Waktu Penyelesaian Perkara****Pasal 31**

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
 - a. sangat sulit;
 - b. sulit

- b. sulit;
 - c. sedang; atau
 - d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
 - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
 - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Paragraf 3 Surat Perintah Penyidikan

Pasal 33

- (1) Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan serendah-rendahnya oleh pejabat:
- a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri;
 - b. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polda;
 - c. Kepala

- c. Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes; atau
 - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (4) Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 34

- (1) Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.
- (2) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- (3) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu:
 - a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
 - b. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes; atau
 - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (5) SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 4

Perwira Pengawas Penyidik

Pasal 35

- (1) Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan wajib menunjuk Perwira Pengawas Penyidik dan membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik merupakan Atasan Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah.

(2) Perwira

- (2) Perwira Pengawas Penyidik bertugas:
- a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;
 - c. mencegah pencegahan terjadinya hambatan penyidikan;
 - d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
 - e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
 - f. meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan Polri;
 - g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan
 - h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/ pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pengendalian Perkembangan Penyidikan

Pasal 37

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari:

- a. laporan perkembangan penyidikan; dan
- b. koreksi hambatan penyidikan.

Pasal 38

- (1) Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, penyidik melaporkan secara berkala kepada Perwira Pengawas Penyidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan berkala yang disampaikan kepada pimpinan melalui Perwira Pengawas Penyidik.
- (3) Setiap laporan perkembangan penyidikan wajib dilaporkan oleh Perwira Pengawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 40

- (1) SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. pokok perkara;
 - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
 - d. rencana tindakan selanjutnya; dan
 - e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
- (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Pasal 42

- (1) Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. arahan Perwira Pengawas Penyidik;
 - b. penyelenggaraan gelar perkara;
 - c. penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik;
 - d. pemberian bantuan/*back-up* penyidikan oleh satuan atas;
 - e. peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana (CJS); atau
 - f. pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

Pasal 43

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;
 - b. konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara;
 - c. pemeriksaan intensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
 - d. tindakan penghentian kegiatan penyidik;
 - e. tindakan administratif penggantian penyidik; atau
 - f. tindakan disiplin bagi penyidik.
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa:
 - a. hukum disiplin;
 - b. kode etik profesi; atau
 - c. proses peradilan umum.

Bagian Ketiga Gelar Perkara

Pasal 44

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara:

- a. biasa; dan
- b. luar biasa.

Pasal 45

- (1) Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan pada tahap:
 - a. awal penyidikan;
 - b. pertengahan penyidikan; dan
 - c. akhir penyidikan.
- (2) Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengembalian fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.
- (3) Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.

(4) Dalam hal

- (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

Pasal 46

- (1) Gelar perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:
- a. meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
 - b. menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
 - c. merumuskan rencana penyidikan;
 - d. menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
 - e. menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
 - f. menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
 - g. menentukan target-target penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara.
- (3) Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

Pasal 47

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. penentuan tersangka;
 - b. pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
 - c. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
 - d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);
 - e. mengembangkan sasaran penyidikan;
 - f. penanganan perkara yang terlantar;
 - g. supervisi pencapaian target penyidikan; dan
 - h. percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh:
- a. pengawas penyidikan;
 - b. Inspektorat

- b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
- c. Propam Polri;
- d. Pembinaan Hukum Polri;
- e. CJS; dan/atau
- f. instansi/pihak terkait lainnya.

Pasal 48

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
 - a. penyempurnaan berkas perkara;
 - b. pengembangan penyidikan;
 - c. memutuskan perpanjangan penyidikan;
 - d. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
 - e. memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU;
- (2) Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang diperlukan.

Pasal 49

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait.
- (2) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang disidik;
 - b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;
 - c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;
 - d. memutuskan penghentian penyidikan;
 - e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan; dan/atau
 - f. menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan.
- (3) Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perkara:
 - a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah;
 - b. atensi

- b. atensi pimpinan Polri;
 - c. perhatian publik secara luas;
 - d. melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal;
 - e. berada pada hukum perdata dan hukum pidana;
 - f. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
 - g. penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan;
 - h. penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.
- (4) Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atas pembina fungsi dan keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analis di satuan reserse dan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk serta dihadiri oleh instansi/pihak terkait.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya:
- a. Direktur/Karo Analis pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk Tingkat Polda; atau
 - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.
- (3) Dalam hal penanganan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh:
- a. Kepala Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
 - b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau
 - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.

Pasal 51

- (1) Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain:
- a. pengawas penyidikan;
 - b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
 - c. Propam Polri;

d. Pembinaan

- d. Pembinaan Hukum Polri;
 - e. CJS; dan/atau
 - f. instansi/pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta saksi ahli yang diperlukan.

Bagian Keempat Tata Cara Gelar Perkara

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. kelanjutan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
 - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c. tanggapan para peserta gelar perkara;
 - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
 - e. kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
 - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Bagian Kelima Keputusan Gelar Perkara

Pasal 53

- (1) Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- (2) Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus dipedomani bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (3) Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus ditaati oleh Tim Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 54

- (1) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara.
- (2) Pejabat yang berwenang menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (3) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 55

Penyidik yang tidak melaksanakan putusan Gelar Perkara Luar Biasa tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penggantian penyidik yang menangani perkara;
- b. pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara;
- c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; atau;
- d. penerapan sanksi hukuman disiplin atau etika profesi.

BAB V**PEMANGGILAN****Bagian Kesatu
Pemanggilan Tahap Penyelidikan****Pasal 56**

- (1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyidik/penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat.

Pasal 57

- (1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan secara sopan;
 - b. tidak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil;
 - c. penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil;
 - d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang dipanggil yang menolak panggilan; dan
 - e. sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin kepada atasan penyidik/penyidik.
- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan
 - b. materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dalam bentuk surat biasa;
 - b. mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
 - c. penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;
 - d. maksud serta tujuan undangan;
 - e. mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;
 - f. pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau tempat pemeriksaan;
 - g. pernyataan

- g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan, dapat menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan
- h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa.

Bagian Kedua Pemanggilan Tahap Penyidikan

Paragraf 1 Pengiriman Panggilan

Pasal 58

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Pasal 59

- (1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak akan melarikan diri.
- (2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- (3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang/pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Pasal 60

- (1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, Penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat dimana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan penyidik.
- (4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

Paragraf 2 Panggilan Kepada Ahli

Pasal 61

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan:
 - a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
 - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
 - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pasal 62

Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

Paragraf 3 Tanda Tangan Surat Panggilan

Pasal 63

- (1) Surat Panggilan kepada saksi, tersangka dan/atau ahli dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
 - a. Direktur di Bareskrim Polri;
 - b. Kasat di Direktorat Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Subbag Reskrim di Polwil;
 - d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes/Polres;
 - e. Kapolsek/Wakapolsek.

(2) Surat

- (2) Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya memerlukan prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; atau
 - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres.
- (3) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Ketiga Surat Perintah Membawa

Pasal 64

- (1) Dalam hal tersangka/saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- (2) Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil;
 - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atau
 - e. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek.
- (3) Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Keempat Pengawasan Dalam Pemanggilan

Pasal 65

Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap Petugas dilarang:

- a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;

b. tidak

- b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
- c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
- d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
- e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan; dan/atau
- f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

Bagian Kelima Penentuan Status Tersangka

Pasal 66

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan langsung.

Pasal 67

- (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- (2) Bukti

- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
- a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
 - b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
 - c. surat;
 - d. petunjuk.

Pasal 68

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menerima laporan dan mengesahkan hasil gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sebagai berikut:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri.
 - b. Kasat Reserse tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 69

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dengan menghadirkan fungsi terkait.
- (2) Gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus tingkat Polda dan Melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kabag Reserse tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kasat Reserse tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.

BAB VI**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN****Bagian Kesatu
Penangkapan****Paragraf 1
Dasar Penangkapan****Pasal 70**

- (1) Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Pasal 71

- (1) Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.
- (2) Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

**Paragraf 2
Surat Perintah Penangkapan****Pasal 73**

- (1) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

Pasal 74

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (2) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3 Tindakan Penangkapan

Pasal 75

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;
- b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
- d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. senantiasa

- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
 - c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
- (2) Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Paragraf 4 Pengawasan Penangkapan

Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- c. memberitahukan alasan penangkapan;
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Pasal 78

- (1) Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
- (2) Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

Paragraf 5

Paragraf 5
Tersangka Anak dan Perempuan

Pasal 79

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 80

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hal mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Paragraf 6
Tindakan Setelah Penangkapan

Pasal 81

- (1) Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara penangkapan yang berisi:
 - a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
 - b. nama identitas yang ditangkap;
 - c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
 - d. alasan penangkapan dan/atau Pasal yang dipersangkakan;
 - e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
 - f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

(2) Setelah

- (2) Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib:
- a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya;
 - b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan
 - c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberi pertolongan kesehatan dan membuat berita acara tentang keadaan tersangka.

Pasal 82

- (1) Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan tersangka atau pembebasan tersangka.

Pasal 83

- (1) Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik.
- (2) Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

Paragraf 7 Pembebasan Tersangka

Pasal 84

- (1) Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.
- (2) Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena masa penangkapan berakhir.
- (3) Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya.

(4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan Tersangka adalah pejabat sebagai berikut:
- a. Kanit di tingkat Bareskrim Polri;
 - b. Kasat Serse di tingkat Polda;
 - c. Kepala/ Kepala Bagian reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kapolsek/Wakapolsek.
- (5) Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Kedua Penahanan

Paragraf 1 Prinsip Penahanan

Pasal 85

- (1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
- a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
 - c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Paragraf 2 Surat Perintah Penahanan

Pasal 86

- (1) Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (4) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 87

- (1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres;
- (3) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3 Penangguhan Penahanan

Pasal 88

- (1) Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan.

(4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 4
Pencabutan Penangguhan Penahanan

Pasal 89

- (1) Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan.
- (2) Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 5
Pengalihan Status Penahanan

Pasal 90

- (1) Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan.

(2) Pengalihan

- (2) Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya;
 - b. hasil penelitian kondisi tersangka;
 - c. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;
 - d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan
 - e. faktor kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 6
Pemindahan Tempat Penahanan

Pasal 91

- (1) Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka untuk kepentingan:
 - a. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya karena peralihan status tersangka sesuai dengan tahap perkembangan perkara;
 - b. pertimbangan keamanan;
 - c. pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.
- (2) Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur

- b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 7 Pembantaran Penahanan

Pasal 92

- (1) Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.
- (2) Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:
 - a. pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan dirumah sakit;
 - b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 93

- (1) Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembantaran Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.

(2) Pencabutan

- (2) Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka telah pulih kembali kesehatannya.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 8 Penahanan Lanjutan

Pasal 94

- (1) Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:
 - a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
 - b. tersangka yang diberikan pembantaran melarikan diri dan berhasil ditemukan kembali.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan Lanjutan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 9

**Paragraf 9
Pengeluaran Tahanan**

Pasal 95

- (1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan pertimbangan:
 - a. masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;
 - b. tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya;
 - c. tersangka ditanggihkan penahanannya;
 - d. tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau
 - e. tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama dan identitas tersangka yang ditahan;
 - b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
 - c. keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan
 - d. tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

**Bagian Ketiga
Perlakuan Tersangka/ Tahanan**

**Paragraf 1
Tahanan Dewasa**

Pasal 96

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

- a. semua

- a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
- b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan pengadilan;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
 1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
 2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 3. tidak melarikan diri.
- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
- f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
- g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
- i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
- j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum;
- k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
- m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
- n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
- o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolahraga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
- p. tahanan

- p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;
- q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
- s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
- v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;
- y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan
- z. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan;
- c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan/atau
- d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Paragraf 2 Tahanan Anak dan Perempuan

Pasal 98

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak

- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 99

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hal mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Saksi

Pasal 100

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin Pengawas Penyidik.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh penasihat hukum.
- (2) Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi.

Bagian

Bagian Kedua Pemeriksaan Tersangka

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukumnya.
- (3) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman melalui video visual atau camera digital yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik.
- (5) Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran penyidikan.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib:

- a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

l. membacakan

- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Bagian Ketiga Pengawasan Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemeriksaan Saksi/ Tersangka

Pasal 104

- | Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang:
- a. memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak saksi/tersangka;
 - c. menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
 - d. tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan pemeriksaan;
 - e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka;
 - f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi/tersangka;
 - h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
 - i. memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi/tersangka;
 - k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan/atau tanpa alasan yang sah;
 - l. tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m. memanipulasi

- m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Paragraf 2 Pemeriksaan Anak dan Perempuan

Pasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasarakatan (Bapas);
- c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 106

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
- b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BAB VIII

TKP

Bagian Kesatu Tindakan Pertama di TKP

Pasal 107

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:
 - a. melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan

- b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
 - c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
 - d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
 - e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
 - g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
 - h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan
 - i. membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP.
- | (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:
- a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
 - b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
 - c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan di TKP;
 - d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
 - e. mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
 - f. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
 - g. sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan

Pasal 108

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
- a. menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;
 - b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
 - d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
 - g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
 - h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
- a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
 - b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
 - d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;
 - e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
 - f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas kebebasannya.

BAB IX**PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN****Bagian Kesatu
Pengeledahan****Paragraf 1
Surat Perintah Pengeledahan****Pasal 109**

- (1) Pengeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Pengeledahan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 110

- (1) Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Pengeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Setelah dilaksanakan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Pengeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

Paragraf 2 Penggeledahan Orang

Pasal 111

- (1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
- a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
 - b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
 - c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
 - d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
 - e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
 - h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
 - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
- (2) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
- a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
 - b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
 - c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
 - d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
 - e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - f. memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
 - g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Paragraf 3

Paragraf 3
Pengeledahan Tempat

Pasal 112

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
- a. melengkapi administrasi penyidikan;
 - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
 - f. melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang dikeledah atau pihak lain;
 - h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang dikeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan; dan
 - j. membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang dikeledah dan para saksi.
- (2) Dalam hal melakukan pengeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
- a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
 - b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan, tanpa alasan yang sah;
 - d. melakukan pengeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang dikeledah;
 - e. melakukan tindakan pengeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
 - f. melakukan

- f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
- g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- k. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- l. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

Bagian Kedua Penyitaan

Paragraf 1 Surat Perintah Penyitaan

Pasal 113

- (1) Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 114

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(2) Setelah

- (2) Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

**Paragraf 2
Pengawasan Penyitaan**

Pasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

- a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
- c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
- f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
- g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

BAB X

PENANGANAN BARANG BUKTI

Pasal 116

- (1) Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses persidangan perkara.
- (2) Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain:
 - a. benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan;
 - d. benda

- d. benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
 - e. benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

BAB XI

PENYELESAIAN PERKARA

Bagian Kesatu Penghentian Penyidikan

Paragraf 1 Dasar Penghentian Penyidikan

Pasal 117

- (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara terdiri dari:
- a. tidak cukup bukti;
 - b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
 - c. demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tersangka meninggal dunia;
 - b. perkara telah melampaui masa daluwarsa;
 - c. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
 - d. *nebis in idem* (tindak pidana memperoleh putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap).

Paragraf 2 Penghentian Penyidikan

Pasal 118

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:

- a. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
- b. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan
- c. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU.

Pasal 118

Pasal 119

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil; atau
 - d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 merupakan pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a adalah:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri setelah mendapatkan persetujuan Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil setelah mendapatkan persetujuan kepada Kapolwil; atau
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan persetujuan Kapolres.

Pasal 120

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SP3.

Paragraf 3

Prosedur Penghentian Penyidikan

Pasal 121

- (1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

- (2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.

- (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
 - a. Karo Analisis pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala

- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

Pasal 122

- (1) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
 - b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Itwas Polri;
 - d. Binkum Polri;
 - e. Propam Polri;
 - f. saksi Ahli;
 - g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan
 - h. dapat menghadirkan pihak terlapor.
- (2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
 - b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Itwas Polri;
 - d. Binkum Polri
 - e. Propam Polri;
 - f. pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
 - g. pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan
 - h. pejabat JPU bila sangat diperlukan.

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
 - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c. paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
 - d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
 - e. kesimpulan hasil gelar perkara.

(2) Tahap

- (2) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
 - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 124

- (1) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.
- (2) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
- (3) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.
- (4) Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.

Paragraf 3

Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan

Pasal 125

- (1) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
 - a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan;
 - b. ditemukan bukti baru (*novum*) yang dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke JPU; dan
 - c. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan serendah-rendahnya:
 - a. Kabareskrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri;
 - b. Kapolda

- b. Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan jajarannya; atau
 - c. Kapolwil untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres jajarannya.
- (3) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
- a. penyidik dan Perwira Pengawas Penyidik yang menghentikan penyidikan;
 - b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
 - c. Atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
 - d. Itwas Polri;
 - e. Binkum Polri;
 - f. Propam Polri;
 - g. pihak pelapor; dan
 - h. pihak terlapor.

Bagian Kedua Pemberkasas Perkara

Pasal 126

- (1) Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpulkan di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah ditentukan.
- (2) Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses penyidikan.
- (3) Barang bukti yang disita berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempat khusus penyimpanan Barang Bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berkas Perkara wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau disimpan pada *database* elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

Pasal 127

- (1) Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi:
 - a. sampul berkas perkara;
 - b. daftar isi;
 - c. berita acara pendapat/resume;
 - d. laporan polisi;

e. Berita

- e. berita acara setiap tindakan penyidik;
 - f. surat-surat administrasi penyidikan;
 - g. daftar saksi;
 - h. daftar tersangka; dan
 - i. daftar barang bukti.
- (2) Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib di segel untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

Bagian Ketiga Penelitian Berkas Perkara

Pasal 128

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Berkas Perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik meliputi susunan dan isi Berkas Perkara.
- (2) Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara kepada Perwira Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan penelitian yang mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara.
- (3) Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
- (4) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup masalah persyaratan format pembuatan surat atau Berita Acara meliputi: pencantuman nama dan tempat kesatuan, pro justitia, judul surat, penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persyaratan materi surat atau Berita Acara meliputi: Dasar pembuatan surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analisa perkara, analisa yuridis dan kesimpulan.

Bagian Keempat Penyerahan Perkara

Pasal 129

- (1) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU.
- (2) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;

b. Direktur

- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (3) Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan Langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 130

- (1) Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada JPU dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi.
- (2) Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dengan keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan petugas dan cap kesatuan dari petugas dari kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima penyerahan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya.

Pasal 132

- (1) Surat Penyerahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Bagian Kelima Pengendalian Penyelesaian Perkara

Paragraf 1 Sarana Pengendalian/Pengawasan

Pasal 133

- (1) Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penyidikan, setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Perwira Pengawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara berjenjang.

(2) Sarana

- (2) Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat administrasi penyidikan;
 - b. pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan;
 - c. pencatatan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam daftar kronologis penindakan;
 - d. pembuatan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara insidentil atau berkala;
 - e. pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan; dan
 - f. analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.

Paragraf 2
Mekanisme Pengendalian/Pengawasan

Pasal 134

- (1) Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi secara tertib oleh setiap kesatuan reserse.
- (2) Setiap pejabat reserse wajib melakukan pengecekan terhadap kesiapan, pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan buku register perkara/buku kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 135

- (1) Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik, di setiap Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdiri dari nomor, tanggal kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan.
- (2) Setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib dicatat oleh penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik.
- (3) Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidik melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara insidentil dan secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan penyidikan yang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan dan tindakan koreksi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan tindakan penyidikan.

Pasal 135

Pasal 136

- (1) Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Lapju) penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penyidik atau dalam hal diminta oleh Atasan Pengawas Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara.

**Paragraf 3
Evaluasi Kinerja Penyidik****Pasal 137**

- (1) Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/satuan reserse, harus dibuat rekapitulasi data tentang kegiatan penyidikan dan hasil penyidikan berupa:
 - a. jumlah perkara yang dilaporkan, diproses dan diselesaikan;
 - b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh unit/satuan reserse meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyerarahan berkas perkara tahap kedua.
- (2) Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan harus dievaluasi secara berkala dan berjenjang dari unit reserse tingkat Polsek sampai satuan reserse tingkat Bareskrim Polri paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse.
- (3) Setiap satuan reserse di kewilayahan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjenjang dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut:
 - a. Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah diterima Polres;
 - b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah diterima Polda;
 - c. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 13 (tiga belas) sudah diterima Mabes Polri.
- (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:
 - a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse;
 - b. evaluasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan
 - c. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Pasal 138

- (1) Analisa dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian penyidikan pada setiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik yaitu:
 - a. analisis kinerja reserse semester pertama setiap tahun; dan
 - b. analisis kinerja reserse setiap akhir tahun.
- (2) Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan jadwal pengiriman:
 - a. Anev Semester Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda dan Anev Semester Pertama dari Polda paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan
 - b. Anev Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

BAB XII

PENCARIAN ORANG, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu

Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pasal 139

- (1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 140

- (1) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penangkalan

Pasal 141

- (1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- (2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- (3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkai orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- (4) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan sebagai berikut:
 - a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reskrim di tingkat Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan
 - d. Kepala/Wakil Kepala KKO.
- (5) Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat pengukuhan melalui Keputusan Kapolri.

BAB XIII**TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI****Bagian Kesatu
Penggolongan Sanksi****Pasal 142**

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran menurut golongan jenis:
 - a. hukum pidana;
 - b. peraturan disiplin Polri; dan
 - c. etika profesi kepolisian.

- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara administratif berupa:
 - a. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
 - b. pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik;
 - c. teguran tertulis;
 - d. tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara;
 - e. tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu;
 - f. tindakan pengguguran (*growndit*) dari tugas penyidikan;
 - g. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan; dan
 - h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

Pasal 143

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:
 - a. penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;
 - c. mutasi yang bersifat demosi; dan
 - d. pembebasan dari jabatan.

- (2) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dapat dikenakan hukuman berupa:
 - a. tindakan pengguguran (*growndit*) dari tugas penyidikan; dan
 - b. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.

Bagian

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 144

Sanksi administrasi untuk pelanggaran administrasi dapat dijatuhkan oleh:

- a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan
- b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau terhadap Penyidik.

Pasal 145

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Kode Etik profesi Polri.

Pasal 146

Tata Cara penjatuhan hukuman Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam hal Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 148

Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang tidak cukup dihukum dengan pemberian sanksi administrasi, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran.

Pasal 150

Kapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana secara teknis terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Kapolri yang diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Polri.

Pasal 151

Pasal 151

Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang telah ada sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 152

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 429

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

- Pengendali/Penanggung jawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Anggota terdiri dari unsur :
- 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2 Kejaksaan Agung
 - 3 Kementerian Dalam Negeri

- 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 6 Ombudsman Republik Indonesia
- 7 Badan Intelijen Negara
- 8 Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau

sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/ Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

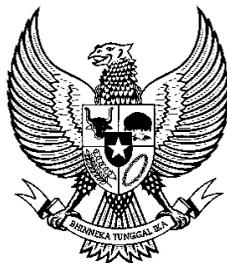
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 202





WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 511 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak mental kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, dan satuan kerja yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi tangkap tangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd

SULISTIYO

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur Provinsi DIY;
 3. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta;
 4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 5. Yang bersangkutan.
-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 511 TAHUN 2016
 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
 LIAR DI KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI
 KOTA YOGYAKARTA

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Keterangan
1.	Pembina	Walikota	
2.	Pengarah	1. Wakil Walikota 2. Ketua Pengadilan Negeri 3. Ketua Pengadilan Agama 4. Kepala Polres 5. Kepala Kejaksaan Negeri 6. Dandim 0734	
3.	Ketua	Wakil Kepala Polres	
4.	Wakil I	Inspektur	
5.	Wakil II	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	
6.	Sekretaris I	Kasiwas Polres	
7.	Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat	
8.	Staf Sekretariat	1. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat 2. Penatalaksana Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat 3. Penatalaksana Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat	Pelaporan
9.	Pokja Unit Intelijen	1. Kasat Intel Polres (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. Fasilitator Pembinaan Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa 4. Pasi Intel Dim 0734 5. Bati ops/lat Dim 0734	Ketua merangkap anggota
10.	Pokja Unit Pencegahan	1. Kasat Binmas Polres (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. Irban Bidang Pembangunan Fisik Inspektorat 4. Irban Bidang Pembangunan Sosekbud Inspektorat 5. Ba pers Dim 0734	Ketua merangkap anggota
11.	Pokja Unit Penindakan	1. Kasat Reskrim Polres (Ketua) 2. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri 3. Polisi Pamong Praja Dinas Ketertiban 4. Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat	Ketua merangkap anggota

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Keterangan
12.	Pokja Unit Yustisi	1. Kasat Shabara (Ketua) 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 3. KaSubBag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Basi Intel Dim 0734	Ketua merangkap anggota

Plt. WALIKOTA YOGYAKARTA
Asisten Bidang Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd

SULISTIYO

